DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Ahmad Mujahid Ramli, *Cyberlaw dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004.

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

B. Arief Sidharta dan Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Mazhab Dan Refleksinya*, Remadja Karya, Bandung, 1989.

Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.

C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989.

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Gravindo Persada, Bandung, 2000.

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Huku*m, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Otje Salman Soemadiningrat, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004.

P. A. F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1995.

Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Wawan Tunggul Alam, *Hukum Bicara*, Bentara Cipta Prima, Jakarta, 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Tentang Hukum Laut 1982.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Surat Laik operasi.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Sumber Lain

Buku Putih Politik Luar Negeri Indonesia, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2003.

Laporan Akhir (*Finnal Report*), Rencana Aksi IUU *Fishing (NPOA),* Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan Perikanan, 2000.

Laporan Antara, Evaluasi Implementasi *Vessel Monitoring System*, Ditjen Pengawasan dan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan perikanan, Giwaci Consultant, Jakarta, 2009.

Makalah, *Penyusunan Penulisan Hukum Pada Fakultas Hukum Unikom*, disampaikan pada acara *"Up-Grading Refreshing Course-Legal Research Methodology"*, Bandung, 10 Maret 2010.

Refleksi 2008 & Outlook 2009, Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan Perikanan, 2008.

Refleksi 2009 & Outlook 2010, Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan Perikanan, 2009.

Situs

http://mukhtar-api.blogspot.com

http://www.dkp.go.id